



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Evaluasi program kotaku sebagai penanganan kumuh di kecamatan panjang

F.I. Simanjourang^{a,*}

^aProgram Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 30 Agustus 2021
Direvisi 18 November 2021
Diterbitkan 24 Desember 2021

Kata kunci:

Program KOTAKU
Penanganan Kumuh
Evaluasi Program

Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Indonesia yang terdapat kawasan kumuh. Kawasan kumuh Kota Bandar Lampung adalah 4.365,26 Ha, dimana 44,55 Ha kawasan kumuh berat, 2.073,05 Ha kawasan kumuh sedang dan 2.247,66 Ha kawasan kumuh ringan. Salah satu kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung terletak di kawasan pesisir teluk Lampung yaitu di Kecamatan Panjang. Dengan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh akan membuat pembangunan program KOTAKU berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program KOTAKU dalam penanganan permasalahan kumuh di Kecamatan Panjang dengan sasaran mengidentifikasi program KOTAKU terhadap penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, menganalisa kondisi fisik dari program penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, dan, mengevaluasi keberhasilan program KOTAKU dalam penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian campuran, dimana akan mengkombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dapat dilihat bahwasanya penanganan kumuh di Kelurahan Way Lunik yang semula kategori kumuh ringan menjadi tidak kumuh, sedangkan Kelurahan Ketapang tetap pada kategori kumuh ringan namun setiap permasalahan sudah mengalami penurunan kondisi kumuh, dan evaluasi terhadap penanganan kumuh di Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Way Lunik memberikan dampak terhadap lingkungan permukiman dan perbaikan infrastruktur dasar serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi kondisi kumuh di lingkungan permukiman di kelurahan masyarakat masing-masing.

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kawasan kumuh (Kumala, 2014). Dimana berdasarkan eksistensinya, luas kawasan kumuh yang ada di Indonesia mencapai 38.431 Ha. Tantangan utama dalam mengatasi kawasan kumuh diantaranya tingkat urbanisasi yang semakin pesat dan terbatasnya pelayanan infrastruktur dasar sehingga meningkatkan kawasan kumuh semakin luas. Kawasan kumuh terjadi baik di pusat perkotaan dan ibukota provinsi, salah satunya terjadi di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Pada keputusan tersebut ditetapkan bahwa luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung seluas 4.365,26 Ha, yang terbagi menjadi tiga klasifikasi tingkat kekumuhannya yaitu

44,55 Ha kumuh berat, 2.073,05Ha kumuh sedang dan 2247,66 Ha merupakan kumuh ringan. Salah satu kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung terletak di kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan selat sunda dan juga teluk Lampung yaitu di Kecamatan Panjang.

Kecamatan panjang berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung terdapat jaringan prasarana lalu lintas terminal tipe B, sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan utama panjang dan terminal untuk kawasan pesisir, dan merupakan kawasan rawan bencana gelombang pasang tsunami. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah salah satu program di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang difokuskan pada penanganan permukiman kumuh di perkotaan yang mendukung untuk mewujudkan capaian 100-0-100,

*Penulis korespondensi

E-mail: f.lampung19@gmail.com

yaitu 100 % kebutuhan air minum yang layak, 0 % kawasan permukiman kumuh, dan 100 % sanitasi yang layak sesuai dengan pedoman teknis program kota tanpa kumuh tahun 2016 dan tentunya sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Program KOTAKU menggunakan platform kolaborasi dari ketiga peran yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama dalam menekan laju pertumbuhan kumuh. Sangat disadari bahwa kegiatan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sangat berkaitan dengan masyarakat.

Berdasarkan kondisi diatas, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi keberhasilan program KOTAKU dalam penanganan permasalahan kumuh di Kecamatan Panjang. Dari tujuan tersebut terdapat beberapa kegunaan yang dapat dicapai secara teoritis dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kekayaan ilmu pada penangan kawasan kumuh. Selain itu nantinya dapat menambah pemahaman terhadap dampak program penanganan terhadap perubahan pola, perilaku masyarakat, kepedulian terhadap infrastruktur terbangun dan keberlanjutan program. Sedangkan secara praktis melalui penelitian ini maka pemerintah dapat mengetahui kondisi fisik dari program KOTAKU yang telah diimplementasikan, mengetahui bagaimana peran dari program KOTAKU dalam mengurangi kekumuhan di lokasi studi berdasarkan persepsi masyarakat. Nantinya dapat dimengerti apakah pembangunan fisik membawa perubahan pada pola perilaku masyarakat. Sehingga pada akhir penelitian nantinya dapat disimpulkan apakah program KOTAKU di Lokasi Studi telah berhasil membawa manfaat bagi masyarakat dan merubah wajah permukiman.

1.1. Tinjauan Pustaka

Meningkatnya urbanisasi yang tidak terkontrol menyebabkan terbentuknya permukiman di Kawasan perkotaan Indonesia (Harahap, 2013). Permukiman yang terbentuk dikawasan perkotaan dipaksa untuk menampung tingginya para penduduk urbanisasi, sehingga banyak muncul Kawasan permukiman yang tidak terkendali. Dalam menangani Kawasan permukiman, pemerintah telah beberapa kali memiliki program yang bergerak dalam pembangunan berbasis masyarakat. Dalam proses implementasinya terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan program KOTAKU, yaitu meningkatnya kualitas permukiman kumuh dan mencegah timbulnya kumuh yang baru.

Dalam implementasinya program KOTAKU terdapat beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai program kegiatan yang berkelanjutan. Dalam perencanaan yang dilakukan adalah melakukan penyusunan Dokumen RP2KPKPK/SIAP yang merupakan dokumen kajian terhadap Kawasan permukiman, menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun, penyusunan DED (Gambar Kerja) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dokumen teknis lainnya sebagai salah satu syarat atau Rediness Criteria (RC) dalam pelaksanaan program KOTAKU. Kegiatan yang dilakukan berada di Skala

Kawasan, Skala Lingkungan, dan Pengembangan Kawasan ekonomi serta pelatihan di level vokasional yang berfungsi untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana pekerjaan. Setelah semua proses dilakukan maka sebagai langkah akhir untuk menjaga keberlanjutan program adalah dengan memastikan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur terbangun serta replikasi program yang ada di Kawasan lainnya.

2. Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian campuran, dimana akan mengkombinasikan penelitian kuantitatif (Despa, 2021) dan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif terhadap hasil temuan yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif (Martinus, 2020) merupakan penelitian yang difungsikan untuk menemukan pengetahuan/informasi seluas-luasnya terhadap suatu objek dalam suatu masa tertentu. Desain penelitian yaitu rencana yang dilakukan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Desain dari penelitian terdiri dari tujuan penelitian, kebutuhan data penelitian, serta metode analisis penelitian (Rohmalia, 2021).

Responden penelitian ditentukan dengan metode Purposive Sampling terhadap populasi yaitu masyarakat di dua Kelurahan di Kecamatan Panjang. Dalam rangka penentuan sampel dari populasi penelitian, maka perlu dilakukan penentuan jumlah banyaknya sampel yang akan dilakukan penelitian. Untuk memudahkan dalam menentukan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan metode Slovin. Metode Slovin adalah metode penentuan jumlah sampling dengan mempertimbangkan/mempertimbangkan tingkat signifikansi pada suatu populasi, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(N d^2 + 1)}$$

Keterangan:

- n = Merupakan Jumlah sampel yang diambil
- d² = Merupakan Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90 %)
- N = Merupakan Jumlah populasi

Untuk mengetahui jumlah responden setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 100 responden yang selanjutnya akan digunakan penulis dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk menghasilkan data distribusi responden tiap kelurahan dilakukan dengan perhitungan/rumus alokasi proporsional, yaitu:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Keterangan:

- n_i = Merupakan Jumlah anggota sampel menurut wilayah
- n = Merupakan Jumlah anggota sampel seluruhnya
- N_i = Merupakan Jumlah anggota populasi menurut wilayah
- N = Merupakan Jumlah anggota populasi seluruhnya

Adapun Kriteria responden yang dibutuhkan adalah Masyarakat di Dua Kelurahan yang telah tinggal

minimal 3 (tiga) tahun terakhir di Kecamatan Panjang. Masyarakat lokal dipilih sebagai kriteria responden dikarenakan objek penelitian berada di dua kelurahan di Kecamatan Panjang yaitu di Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Ketapang, sehingga masyarakat lokal dinilai lebih mengetahui terkait implementasi program KOTAKU dan yang ikut merasakan dampak dengan adanya objek tersebut. Laki-laki atau Perempuan dan memiliki usia 30-60 tahun. Laki-laki dan perempuan yang berusia 30-60 tahun dipilih supaya saat melakukan pengambilan data, masyarakat yang di wawancara mengerti dan paham dengan pertanyaan yang diajukan. Terlibat dalam proses implementasi Program KOTAKU. Masyarakat yang ikut terlibat dalam implementasi program KOTAKU dipilih karena masyarakat yang ikut serta dalam implementasi program merupakan pihak yang dapat membantu menyediakan informasi terkait program KOTAKU dan mengetahui kondisi sebenarnya mengenai program KOTAKU di lokasi studi.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian. Hal ini nantinya akan menjadi panduan bagi peneliti untuk memastikan data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara tepat dan sesuai kebutuhan analisis. Secara umum Teknik pengumpulan data akan dilakukan dalam dua cara, yaitu secara primer dan sekunder. Secara primer, peneliti akan turun langsung kelapangan untuk mengambil sample data untuk diolah dan dianalisis. Tujuan melakukan survey primer adalah melihat kondisi yang sebenarnya dilapangan. Selain itu juga survey primer akan mengevaluasi kondisi lapangan terkait dengan program KOTAKU di Kecamatan Panjang dan dilanjutkan pada proses analisa.

Dalam mengumpulkan data, dibutuhkan data dan informasi melalui pertama survey data primer yang diperoleh dalam bentuk observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi di mana wilayah penelitian difokuskan pada dua Kelurahan yang merupakan Kawasan Kumuh. Dimana didalamnya akan terdiri dari beberapa langkah identifikasi antara lain Teknik Observasi digunakan untuk memperoleh informasi dan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan. Dalam hal ini metode wawancara yang digunakan dengan semi terstruktur yang bertujuan untuk mencari dan menemukan permasalahan yang ada, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan saran.

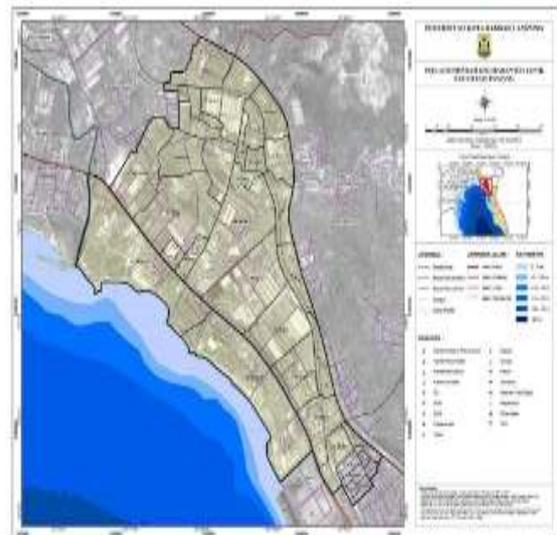
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama analisis deskriptif, merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian yang pada suatu masa tertentu. Kedua analisis kondisi kumuh permukiman, analisis kondisi kumuh permukiman digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa kondisi fisik dari program penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dan yang ketiga analisis persepsi masyarakat, analisis persepsi masyarakat digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi keberhasilan program KOTAKU sebagai upaya penanganan kawasan kumuh.

3. Hasil dan pembahasan

Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai Nahkoda/pembawa kendali dalam pelaksanaan pengurangan kawasan permukiman kumuh dan meningkatkan kapasitas masyarakat setempat sebagai subyek pembangunan melalui peran dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah dibentuk. Dalam proses implementasinya terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan program KOTAKU, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya kumuh baru. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai program KOTAKU untuk penanganan Kumuh di Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Ketapang.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 406/III.24/HK/2016, Kecamatan Panjang merupakan satu dari 18 kecamatan yang memiliki kawasan kumuh dua diantaranya berada di Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Ketapang (Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 406/III.24/HK/2016).

Kelurahan Way Lunik secara administrasi masuk dalam Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Kelurahan Way Lunik memiliki Potensi geografis Sumber Daya Alam berupa Sungai dan kawasan Pinggir Pantai Teluk Betung, kondisi potensi geografis berupa kawasan pantai dan sungai tidak begitu berdampak positif bagi masyarakat setempat dikarenakan kurang optimalnya dalam memanfaatkan potensi yang ada, bahkan sekarang ini sungai yang berfungsi untuk menampung air yang ada tidak cukup sehingga mengakibatkan bencana banjir di kawasan dataran rendah kelurahan Way Lunik.



Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Way Lunik

Tabel 1. Indikator Kekumuhan di Kelurahan Way Lunik

KRITERIA INDIKATOR FISIK		PARAMETER	NILAI (%)
Permasalahan Bangunan/Gedung (%)	Kondisi	a. Ketidakteraturan Gedung/Bangunan	70,00%
		b. Kepadatan Gedung/Bangunan	0,00%
		c. Ketidaksesuaian Teknis Bangunan	1,43%
		Rata-rata Kondisi Bangunan/Gedung (%)	23,33%
Permasalahan Jalan Lingkungan	Kondisi	a. Pelayanan Jalan Lingkungan	0,00%
		b. Kualitas Jalan lingkungan	94,00%
		Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan (%)	47,00%
Permasalahan Penyediaan Air Minum	Kondisi	a. Ketersediaan layanan/Akses Aman Air Minum	0,00%
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0,00%
		Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum	0,00%
Permasalahan Drainase Lingkungan	Kondisi	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00%
		b. Ketidakterediaan Drainase	0,00%
		c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	0,00%
		d. Tidak terpeliharanya Drainase	75,00%
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	25,00%
		Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan	20,00%
Kondisi Penyediaan Air Limbah	Kondisi	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	2,86%
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	2,86%
		Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah	0,00%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Kondisi	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	100,00%
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	100,00%
		c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	0,00%
		Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan	66,67%
Kondisi Kebakaran	Kondisi	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0,00%
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0,00%
		Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran	0,00%

Bahwasanya permasalahan kawasan kumuh di Kelurahan Way Lunik adalah indikator kondisi bangunan, indikator kondisi jalan lingkungan, indikator kondisi drainase, indikator kondisi penyediaan air limbah, dan indikator pengelolaan persampahan. Permasalahan yang ada di Kelurahan Way Lunik antara lain: Masih banyak warga Kelurahan Way Lunik yang memiliki rumah yang tidak layak huni seperti rumah masih papan dan geribik, adapun yang permanen dinding yang belum dipelster lantai masih tanah, tidak ada ventilasi, dsb. Kepemilikan tanah masih banyak yang menumpang di kawasan pabrik dan perusahaan swasta, dan kepemilikan tanah dan bangunan masih ilegal / menumpang di Bantaran Rel Kerta Api milik PT. KAI. Belum ada pengelolaan sampah dan tidak tersedia tempat pembuangan sampah sementara yang memadai. Sampah biasanya ditimbun dipekarangan ataupun dibakar dan juga masih terdapat beberapa warga yang membuang sampah kesungai. Dan masih terdapat warga yang belum memiliki septictank, sehingga perilaku hidup bersih tidak masih belum tercapai.

Untuk mengurangi penanganan kumuh, maka perlu adanya skenario penanganan kumuh. Skenario

Penanganan Kumuh perlu disesuaikan dengan RPJMN, maka dilaksanakan secara Kolaboratif dan berkelanjutan dengan tujuan yaitu menargetkan 0% Kumuh di Tahun 2024. Pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya akan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan melalui program-program pemerintah dan swadaya masyarakat di Kelurahan Way Lunik. Strategi perencanaan Kelurahan Way Lunik antara lain: Sinergi perencanaan dengan pemerintah daerah untuk pengembangan sarana prasarana dasar permukiman; Menjalin kemitraan dengan perusahaan



industri dalam pelestarian dan penghijauan lingkungan; Perlindungan permukiman way lunak terhadap masalah banjir dan genangan air; Pengembangan ekonomi dan industri kecil. Pengembangan kemitraan dalam

menyelesaikan masalah Tridaya. Dan pengembangan masyarakat Way Lunik menjadi masyarakat mandiri.

Gambar 2. Kondisi Fisik Kelurahan Way Lunik Sebelum Penanganan Kumuh

Tabel 2. Program KOTAKU Terhadap Penanganan Kumuh di Kelurahan Way Lunik

No	Program	Kegiatan
1	Pembangunan prasarana dasar permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Sumur Bor • Pembuatan saluran drainase baru • Perbaikan saluran drainase yang rusak/ tidak berfungsi • Perbaikan jalan
2	Pembangunan sarana dasar permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara • Pembuatan Gapura
3	Peningkatan kapasitas masyarakat Kelurahan Way Lunik dalam hal pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Rumah Belajar • Pengadakan acara/ kegiatan sosialisasi dengan tema cinta lingkungan permukiman
4	Program pendampingan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan program-program lingkungan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi masyarakat dalam mengelola program-program penanganan masalah lingkungan permukiman oleh tim pendamping dalam bentuk bimbingan teknis
5	Program bedah rumah	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan perbaikan terhadap rumah-rumah dengan kondisi fisik buruk/ parah
6	Pembangunan kawasan prioritas menjadi kawasan hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Penghijauan kawasan sempadan sungai melalui penanaman pohon-pohon/ tanaman lainnya yang berfungsi sebagai estetika dan mendukung penghijauan. • Penanaman pohon-pohon hijau di setiap rumah dan lingkungan permukimannya • Penanaman tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai penyaring polusi

Strategi tersebut diturunkan menjadi kegiatan supaya strategi tersebut terealisasi. Berikut adalah program KOTAKU terhadap penanganan kumuh di Kelurahan Way Lunik.

Sedangkan berdasarkan dokumen rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2020, Kelurahan Ketapang tergolong kedalam kawasan permukiman kumuh ringan. Berikut adalah peta kawasan kumuh di Kelurahan Ketapang.



Gambar 3. Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Ketapang

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh. Berikut kondisi Kelurahan Ketapang sebelum adanya penanganan kumuh. (Permen PUPR No.14, 2018)



Gambar 4. Kondisi Fisik Kelurahan Ketapang Sebelum Penanganan Kumuh

Tabel 3. Indikator Kekumuhan di Kelurahan Ketapang

ASPEK	KRITERIA	NILAI
Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	46,40%
	b. Kepadatan Bangunan	0,00%
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	10,44%
	Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung	15,47%
Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	8,80%
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	51,10%
	Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan	25,55%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	20,75%
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	61,00%
	Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum	30,50%
Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	7,52%
	b. Ketidakterediaan Drainase	0,00%
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	0,00%
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	100,00%
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	82,78%
	Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan	36,56%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	6,22%
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	15,15%
	Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah	0,00%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	100,00%
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	66,80%
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100,00%
	Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan	88,93%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0,00%
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	0,00%
	Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran	0,00%

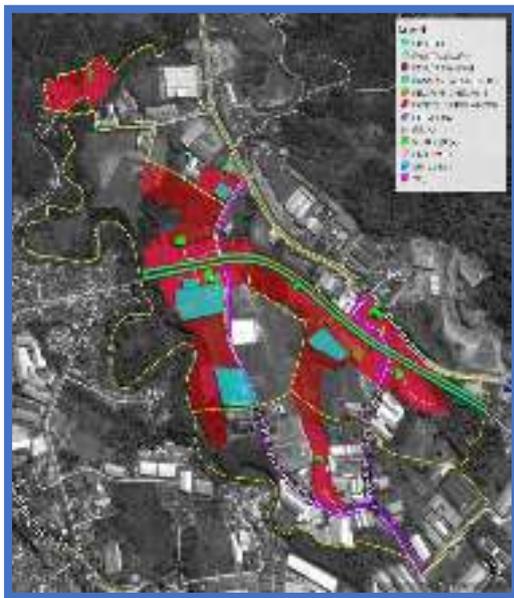
Bahwasanya permasalahan kawasan kumuh di Kelurahan Ketapang sesuai indikatornya yaitu indikator kondisi bangunan, indikator kondisi jalan lingkungan, indikator kondisi penyediaan air minum, indikator kondisi drainase, indikator kondisi penyediaan air limbah, dan indikator pengelolaan persampahan. Untuk mengatasi kawasan kumuh di Kelurahan Ketapang maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan. Hal ini dilakukan supaya tepat sasaran apa yang menjadi

permasalahan utama sehingga permasalahan tersebut segera tertangani. Setelah menentukan strategi dan arah kebijakan, kemudian dirumuskan sasaran dan tujuan apa yang akan dicapai dan berikutnya sasaran dan tujuan tersebut diturunkan menjadi kegiatan sebagai bentuk aksi untuk penanganan kumuh di Kelurahan Ketapang. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan untuk penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Ketapang.

Tabel 4. Program KOTAKU Terhadap Penanganan Kumuh di Kelurahan Ketapang

Strategi & Arah Kebijakan	Tujuan & Sasaran	Kegiatan
	<p>Tujuan: Meningkatkan Keteraturan Bangunan</p> <p>Sasaran: Meningkatkan Sektor Keteraturan Bangunan dari 37% menjadi 80%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Panitia Operasional dan Pemeliharaan Perbaikan Drainase Lingkungan. 2. Pembuatan Drainase untuk Jalan Lingkungan di beberapa RT yang belum ada drainasenya

Strategi & Arah Kebijakan	Tujuan & Sasaran	Kegiatan
Strategi: Peningkatan penanganan sistem jaringan Drainase dan pengendalian Banjir	Tujuan: Meningkatkan Perbaikan Jalan Lingkungan Sasaran: Meningkatnya Akses Jalan Lingkungan dari 36% menjadi 80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Panitia Operasional dan Pemeliharaan Perbaikan Jalan Lingkungan. 2. Pembuatan Jalan Rabat Beton di Lokasi Jalan Tanah di Ketapang
	Tujuan: Meningkatkan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir Sasaran 1: Meningkatnya kondisi drainase /saluran pembuangan air sepanjang jalan dengan kondisi baik dari 74,78% menjadi 100,00% Sasaran 2: Menurunnya kondisi drainase tersumbat dari 25,22% menjadi 0,00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Drainase yang mengakibatkan genangan 2. Normalisasi Pembuatan Sumur resapan di dataran rendah
Strategi 1: Peningkatan pelayanan air bersih	Tujuan: Meningkatkan produksi air bersih Sasaran: Meningkatnya cakupan layanan air bersih dari 40,00% menjadi 80,00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normalisasi eksisting Sumur Bor yang tidak terkelola 2. Pembentukan Panitia Operasional dan Pemeliharaan Pembangunan Sumur Bor. 3. Pembangunan Sumur Bor dan Perpipaan 4. Pengadaan dan peremajaan jaringan pipa air bersih



Gambar 5. Peta Rencana Pengurangan Kawasan Kumuh di Kelurahan Ketapang

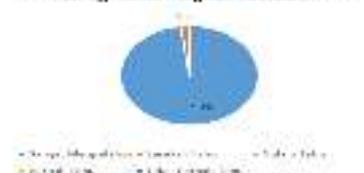
Berdasarkan peta diatas, dapat dilihat bahwasanya kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Ketapang yaitu permukiman yang berada di pinggir rel kereta api sehingga membahayakan masyarakat. Rencana penanganan kawasan permukiman kumuh untuk sektor permukiman yang dapat dilakukan yaitu dengan relokasi permukiman dengan mengarahkan permukiman ke wilayah yang belum memiliki fungsi lahan. Sehingga kondisi sektor permukiman akan teratur dan tidak menumpuk di pinggir rel kereta api. Selain itu juga terdapat peningkatan sistem drainase di sepanjang jalan

dari 74% menjadi 100% sebagai upaya pengendali banjir diluar kawasan bantaran rel kereta api.

Setelah membahas terkait program penanganan kumuh di Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Ketapang, maka dapat dilihat kondisi fisik dari program penanganan kawasan kumuh. Pembahasan ini akan melihat perbedaan kondisi fisik berdasarkan persepsi masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai perubahan sebelum dan sesudah program penanganan kumuh. Berikut adalah pemaparan mengenai kondisi fisik terhadap program penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Ketapang.

Persepsi adalah proses yang ditempuh individu untuk menafsirkan kesan-kesan agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Proses pengindraan terjadi setiap saat, yaitu pada saat waktu individu menerima stimulus mengenai dirinya melalui alat indera. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan dalam persepsi mereka yang mengenai apa itu realitas dan apa yang bukan mengenai realitas itu sendiri.

Apakah Masyarakat Kelurahan Way Lunik Mengikuti Program KETAJIP?





Gambar 6. Grafik Persepsi Masyarakat Kelurahan Way Lunik Terhadap Program KOTAKU

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwasanya masyarakat Kelurahan Way Lunik mengetahui dengan adanya program KOTAKU (98%). Masyarakat Kelurahan Way Lunik juga mengetahui bahwasanya program penanganan kumuh KOTAKU berjalan dengan baik (99%). Sehingga masyarakat Kelurahan Way Lunik setuju atas adanya program penanganan kumuh (100%) karena dapat menurunkan nilai ambang tingkat kumuh di Kelurahan Way Lunik.



Gambar 7. Grafik Persepsi Masyarakat Kelurahan Ketapang Terhadap Program KOTAKU

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwasanya masyarakat Kelurahan Ketapang mengetahui dengan adanya program KOTAKU (98%). Masyarakat Kelurahan Ketapang juga mengetahui bahwasanya program penanganan kumuh KOTAKU berjalan dengan baik (99%). Sehingga masyarakat Kelurahan Ketapang setuju atas adanya program penanganan kumuh (100%) karena dapat menurunkan nilai ambang tingkat kumuh di Kelurahan Ketapang.



Tabel 4. Tabulasi Kondisi Fisik Kelurahan Way Lunik Sebelum dan Sesudah Penanganan KOTAKU

Indikator	Sub Indikator	Penilaian Sebelum Penanganan	Penilaian Setelah Penanganan
Indikator Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan bangunan	4,9	7,3
	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	4,8	7,2
	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat	4,8	7,2
Indikator Kondisi Jalan Lingkungan	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman	4,8	7,3
	Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk	4,9	7,3
Indikator Kondisi Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan tidak tersedia	4,8	7,2
	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	4,9	7,3

Indikator	Sub Indikator	Penilaian Sebelum Penanganan	Penilaian Setelah Penanganan
Indikator Kondisi Sistem Pengelolaan Air Limbah	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	4,7	7,4
	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	4,8	7,2
Indikator Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	4,9	7,2
	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	4,9	7,2
	Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	4,8	7,1

Berdasarkan penjelasan mengenai persepsi masyarakat diatas, Penilaian Kondisi Fisik dibagi menjadi 3 yaitu 1,9-4,4 permasalahan kondisi fisik berat, 4,5-7,0 permasalahan kondisi fisik sedang, dan 7,1-9,5 permasalahan kondisi fisik ringan. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik akibat dari adanya penanganan kumuh di Kelurahan Way Lunik

memberikan dampak lingkungan untuk masyarakat sehingga program penanganan kawasan kumuh dapat mengurangi jumlah tingkat kekumuhan di Kelurahan Way Lunik ini terlihat bahwasanya permasalahan kondisi fisik meningkat yang mulanya dalam kondisi sedang menjadi kondisi ringan.

Tabel 5. Tabulasi Kondisi Fisik Kelurahan Ketapang Sebelum dan Sesudah Penanganan KOTAKU

Indikator	Sub Indikator	Penilaian Sebelum Penanganan	Penilaian Setelah Penanganan
Indikator Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan bangunan	4,7	7,3
	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	4,9	7,4
	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat	4,8	7,5
Indikator Kondisi Jalan Lingkungan	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman	4,9	7,5
	Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk	4,7	7,2
Indikator Penyediaan Air Minum	Akses aman air minum tidak tersedia	4,9	7,3
	Kebutuhan air minum minimal setiap individu	4,7	7,4
Indikator Kondisi Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan tidak tersedia	4,7	7,3
	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	4,6	7,2
	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5,0	7,3
Indikator Kondisi Sistem Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	4,9	7,1
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	4,6	7,4
Indikator Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	5,0	7,3
	Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	4,7	7,3

Berdasarkan penjelasan mengenai persepsi masyarakat diatas, Penilaian Kondisi Fisik dibagi menjadi 3 yaitu 1,9-4,4 permasalahan kondisi fisik berat, 4,5-7,0 permasalahan kondisi fisik sedang, dan 7,1-9,5 permasalahan kondisi fisik ringan. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik akibat dari adanya penanganan kumuh di Kelurahan Ketapang dapat memberikan dampak lingkungan untuk masyarakat sehingga program penanganan kawasan kumuh dapat mengurangi jumlah tingkat kekumuhan di Kelurahan Ketapang hal ini terlihat bahwasanya permasalahan kondisi fisik meningkat yang mulanya dalam kondisi sedang menjadi kondisi ringan.

Evaluasi Keberhasilan Program KOTAKU Dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Kecamatan Panjang

Permukiman kumuh dipandang sebagai salah satu permasalahan perkotaan baik secara global, sehingga harus ditangani secara kolektif&kolaboratif oleh baik pemerintah pusat serta pemerintah daerah dan masyarakat, maka dari itu muncul program KOTAKU sebagai salah satu langkah strategis nasional mengatasi problem tersebut. Program tersebut adalah penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dengan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan (dari pemerintah, Pemerintahan provinsi, Pemerintahan kota/kabupaten, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya), serta membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program penanganan kumuh dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu mengentaskan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen, dengan penanganan kumuh meliputi aspek pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

KOTAKU selalu berupaya dalam mewujudkan capaian 100-0-100, yaitu 100 % kebutuhan air minum yang layak, 0 % kawasan permukiman kumuh, dan 100 % sanitasi yang layak. (*Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh 2016*). Berdasarkan wawancara dengan perangkat kelurahan baik di Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Way Lunik, masyarakat sangat terbantu dengan adanya program KOTAKU yang diadakan di lingkungan masyarakat. Masyarakat merasakan dampak dari adanya penanganan KOTAKU, seperti kondisi wilayah yang menjadi lebih baik, kondisi jalan lebih baik, kesehatan membaik, dan terhindar dari banjir. Hal ini dikarenakan sebelum adanya penanganan kumuh di Kelurahan Way Lunik dan Ketapang sering terjadi banjir akibat drainase kurang berfungsi dengan baik. Selain itu juga, tingkat

partisipasi masyarakat meningkat. Pihak pemerintah juga turut dalam penanganan kumuh sebagai fasilitator. Hal ini antara masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi dalam penanganan kumuh sehingga memberikan dampak lingkungan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat enam hal penting yang menonjol pada penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Way Lunik yakni (1) Sinergi perencanaan dengan pemerintah daerah untuk pengembangan sarana prasarana dasar permukiman. (2) Menjalin kemitraan dengan perusahaan industri dalam pelestarian dan penghijauan lingkungan. (3) Perlindungan permukiman way lunik terhadap masalah banjir dan genangan air. (4) Pengembangan ekonomi dan industri kecil masyarakat Way Lunik. (5) Pengembangan kemitraan dalam menyelesaikan masalah Tridaya (6) Pengembangan masyarakat Way Lunik menjadi masyarakat mandiri. Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa program KOTAKU berhasil memberikan dampak bagi masyarakat di Kelurahan Way Lunik menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat dilihat bahwasanya indikator kondisi fisik sebelum penanganan dan setelah penanganan kawasan kumuh merasakan perbaikan lingkungan perumahan sekitar baik sarana dan prasarana. Selain itu juga didapatkan hasil bahwasanya masyarakat sangat antusias dengan program KOTAKU karena masyarakat berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh yang dilakukan oleh KOTAKU.

Selain Kelurahan Way Lunik, Kelurahan Ketapang juga menjadi target sasaran dalam mewujudkan konsep "100-0-100", yaitu 100 % kebutuhan air minum yang layak, 0 % kawasan permukiman kumuh, dan 100 % sanitasi yang layak. (*Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh 2016*). Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa strategi dalam penanganan kumuh di Kelurahan Ketapang adalah infrastruktur dasar. Dimana tujuan dan sasaran dalam penanganan kumuh tersebut adalah (1) Meningkatnya Sektor Keteraturan Bangunan Bangunan dari 37% menjadi 80% (2) Meningkatnya Akses Jalan Lingkungan dari 36% menjadi 80% (3) Meningkatnya keberfungsian drainase /saluran pembuangan air sepanjang jalan dengan kondisi baik dari 74,78% menjadi 100% (4) Turunnya kondisi drainase yang tersumbat dari 25,22% menjadi 0% (5) Meningkatnya cakupan layanan air bersih dari 40,00% menjadi 80,00%.

Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa kondisi fisik dari penanganan program KOTAKU menjadi lebih baik dari sebelum penanganan kumuh di Kelurahan Ketapang berhasil menurunkan tingkat kekumuhan ringan menjadi tidak kumuh. Hal ini terlihat bahwa batas ambang nilai kekumuhan di Kelurahan Way Lunik yang bermula 24 (kumuh ringan) menjadi 10 (tidak kumuh) serta tingkat kontribusi penanganan kumuh yang bermula 0% menjadi 58,08% yang menyatakan tingkat kontribusi penanganan kumuh yang tinggi dan dilakukan baik dari pemerintah dan

masyarakat mampu menurunkan tingkat kekumuhan di Kelurahan Ketapang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, didapatkan bahwa program KOTAKU merupakan program yang dibutuhkan di Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Ketapang. Dalam penanganan tersebut, baik pemerintah dan masyarakat turut ikut serta dalam menekankan angka kekumuhan. Selain ikut serta menekan angka kumuh, masyarakat juga turut menjaga fasilitas yang telah dibangun dan dilakukan perbaikan sehingga hasil dari penanganan kumuh dapat terjaga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di 2 kelurahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penanganan kumuh melalui program KOTAKU baik di Kelurahan Ketapang dan Way Lunik terdapat berbagai strategi dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan permasalahan masing-masing kelurahan. Hal ini dapat dilihat bahwasanya penanganan kumuh di Kelurahan Way Lunik yang semula kategori kumuh ringan menjadi tidak kumuh, sedangkan Kelurahan Ketapang tetap pada kategori kumuh ringan namun setiap permasalahan sudah mengalami penurunan kondisi kumuh. Hal ini antara masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi dalam penanganan kumuh sehingga memberikan dampak lingkungan bagi masyarakat. Dapat dilihat bahwasanya ambang tingkat kumuh di masing-masing kelurahan menurun. Strategi yang diberikan mampu memberikan dampak terhadap lingkungan permukiman dan perbaikan infrastruktur dasar serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi kondisi kumuh di lingkungan permukiman di kelurahan masyarakat masing-masing.

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, dapat disampaikan saran sebagai berikut yaitu Bahwa Perlu adanya pendampingan dari Dinas Permukiman dan Permukiman Rakyat Kota Bandar Lampung dan stakeholder lainnya dengan perangkat kelurahan dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan sosialisasi terhadap dampak adanya penanganan kumuh dari program KOTAKU. Perlu adanya strategi yang lebih optimal untuk Kelurahan Ketapang sehingga mampu menurunkan ambang nilai kumuh secara signifikan dan berdampak kepada masyarakat di Kelurahan Ketapang. Pemerintah Kelurahan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kumuh sehingga antara masyarakat dan pemerintah menciptakan kolaborasi untuk mencapai tujuan penurunan indeks kumuh.

Ucapan terima kasih

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. selaku Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik

Universitas Lampung dan Pembimbing Utama yang dengan bijaksana yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Artikel ini;

3. Bapak Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T., PhD., IPU, selaku Pembimbing Kedua atas bimbingan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian Artikel ini;
4. Bapak Dr. Eng.Ir. Aleksander Purba, S.T.,M.T.,IPM., ASEAN Eng selaku Penguji Utama atas kritik dan saran pada pelaksanaan ujian Artikel;
5. Bapak dan ibu dosen pengajar pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi selama mengikuti perkuliahan;
6. Staf administrasi dan karyawan Program Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung yang telah membantu dan melayani dalam kegiatan administrasi;
7. Ibu dan bapak serta seluruh saudara-ku tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa;
8. Seluruh teman-teman Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan Artikel ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Daftar pustaka

- Despa, D., Nama, G. F., Septiana, T., & Saputra, M. B. (2021). Audit Energi Listrik Berbasis Hasil Pengukuran Dan Monitoring Besaran Listrik Pada Gedung A Fakultas Teknik Unila. *Electrician*, 15(1), 33-38.
- Martinus and Suudi, Ahmad and Putra, Rahmat Dendi and Muhammad, Meizano Ardhi (2020) Pengembangan Wahana Ukur Kecepatan Arus Aliran Sungai. *Barometer*, 5 (1). Pp. 220-223. Issn 1979-889x
- Rohmalia, N., Nama, G. F., & Purwasih, N. (2021). Dashboard Monitoring Atmospheric Corrosion Sensor in Material Metal Using Laravel Framework. *Journal of Engineering and Scientific Research*, 3(1), 1-6.
- Harahap "Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia". 2013.
- Kumala, Yusman "Kajian Karakteristik dan Metode Penanganan Kawasan Kumuh". 2014.
- Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 406/III.24/HK/2016.